

BAB V

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Indonesia di era Soeharto memiliki pengalaman yang hebat dalam aktivitas dunia internasional. Peran yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto terbukti dari keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian konflik Mindanao. Konflik Mindanao merupakan salah satu konflik tertua di Asia Tenggara. Konflik Mindanao sudah terjadi sejak abad 16 ketika kolonialisasi Spanyol menempati Filipina. Spanyol melakukan penjajahan sekaligus penyebaran agama Kristen di Filipina. Konflik ini dapat terjadi karena kaum Kristen Spanyol melakukan diskriminasi terhadap umat Islam di Mindanao.

Periodesasi konflik Mindanao dilanjutkan oleh kolonialisme Amerika yang berhasil mengusir Spanyol dari Filipina setelah perjanjian Paris. Amerika lebih bersikap kooperatif dengan para datu dan kasultanan di Mindanao, sebelum pada akhirnya Amerika mengularkan kebijakan *Bacon Bill* di tahun 1926 yang mengundang amarah dan perlawanan dari datu serta kasultanan yang ada di Mindanao. Periode kolonialisasi Amerika berakhir pada tahun 1946 dengan pemberian kemerdekaan bagi Filipina.

Setelah masa kolonialisme, tindakan diskriminatif terhadap umat muslim di Mindanao (Moro) kembali terjadi karena dianggap oleh kaum minoritas oleh pemerintah. Hal tersebut membuat Bangsamoro geram yang berimplikasi pada pembentukan kelompok perlawanan Moro. Kemudian *Muslim National Liberation Front* (MNLF) yang dipimpin oleh Nur Misuari lahir sebagai

kelompok perlawanan Moro yang memperjuangkan hak dan kepentingan Moro. Dari tahun ke tahun MNLF memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat. Bahkan MNLF berkembang menjadi kelompok bersenjata dengan jumlah kombatan yang besar. MNLF melakukan internasionalisasi konflik Mindanao melalui jaringan yang dimiliki oleh Nur Misuari untuk mencari dukungan internasional dalam kasus Mindanao khususnya dari negara-negara Islam. Langkah tersebut berhasil mengundang simpati dari dunia Islam internasional.

OKI bersama dengan negara-negara anggotanya seperti Indonesia, Libia, Arab Saudi, dan Malaysia melibatkan diri dalam konflik Mindanao. Dalam hal ini OKI berperan sebagai fasilitator dan negara-negara anggotanya sebagai mediator. Langkah konkret yang dilakukan oleh OKI yaitu membentuk kelompok enam negara untuk mengidentifikasi konflik Mindanao. Setelah itu untuk penyelesaian konflik OKI mencoba untuk memfasilitasi pihak yang berkonflik untuk berdamai melalui *Tripoli Agreement* sebagai perjanjian damai pertama yang ditandatangani oleh pihak yang berkonflik. Dalam perjanjian tersebut disepakati tentang pemberian otonomi kepada Mindanao. Namun, realitanya *Tripoli Agreement* ini membawa perpecahan internal Moro dengan terbentuknya fraksi baru yakni *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). MILF di pelopori oleh Salamat Hasim sebagai mantan wakil ketua MNLF sebagai bentuk kekecewaan terhadap Nur Misuari yang dinilai mengesampingkan kepentingan Moro dalam *Tripoli Agreement*.

Kemudian adanya kerusuhan yang terjadi setelah *Tripoli Agreement*, OKI bersama negara anggotanya mencoba menginisiasi kembali untuk membawa pemerintah Filipina dan MNLF berada dalam meja perundingan. Hal tersebut

dilakukan sebagai upaya dalam menciptakan perdamaian. Pada tahun 1989 OKI berhasil membawa pihak yang berkonflik pada kesepakatan *Jeddah Accord* sebagai perjanjian baru dengan ketentuan pemberian otonomi yang diperluas kepada Mindanao.

Keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian konflik Mindanao semakin terlihat setelah kegagalan *Jeddah Accord* pada tahun 1990an. Kondisi Mindanao yang semakin panas, dan masa transisi pemerintahan pusat karena keruntuhan rezim Aquino menambah problematika bagi perdamaian di Mindanao. Kerusuhan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap Katolik di Mindanao menjadi bukti dari panasnya kondisi Mindanao setelah mengalami kegagalan dalam implementasi perjanjian *Jeddah Accord*. Kegagalan dalam perjanjian ini menyebabkan dampak trauma bagi Moro dalam bernegosiasi dengan pemerintah Filipina.

Indonesia di era Soeharto semakin membuka tangan kepada Filipina pada saat rezim Fidel Ramos. Presiden Soeharto pun tidak ragu-ragu untuk membantu pemerintah Filipina dalam menyelesaikan konflik Mindanao. Disisi lain Ramos sendiri memiliki tekad besar untuk menyelesaikan konflik dengan Moro karena menganggap konflik bersenjata ini menjadi penyebab utama dalam krisis ekonomi Filipina. Karena mengembalikan pertumbuhan ekonomi Filipina merupakan salah satu yang dijanjikan oleh Ramos pada saat pemilu.

Indonesia memainkan perannya dengan berusaha menjalin komunikasi dengan MNLF agar membuka negosiasi dengan pemerintah Filipina karena

Ramos mengalami kesulitan dalam hal tersebut yang disebabkan adanya kekecewaan pada dua perjanjian sebelumnya. Indonesia tidak ragu untuk mendesak serta memberikan ancaman tidak akan memberikan bantuan apapun kepada MNLF jika kepada Nur Misuari jika MNLF tidak bersedia untuk bernegosiasi. Kemudian Soeharto berhasil mengatur pertemuan antara pemerintah Filipina dengan MNLF di Cipanas pada tahun 1993 untuk membicarakan terkait dengan negosiasi damai untuk penyelesaian konflik Mindanao.

Upaya yang dilakukan Indonesia dalam membawa ke dua aktor yang berkonflik ke dalam suatu perundingan tidak lah mudah. Pasalnya kondisi politik di Mindanao tidak stabil karena adanya fenomena perpecahan dan kekerasan terhadap umat Kristiani. Selain itu konflik Mindanao ini berada pada posisi kompleks, dimana pemerintah Filipina dan Moro memiliki keinginan yang berbeda. Keinginan Moro dalam negosiasi disampaikan oleh Nur Misuari dengan sampul menjadikan Moro sebagai negara federal. Sedangkan pemerintah menginginkan Mindanao tetap pada jalur otonomi.

Banyaknya permintaan Moro mengalami *deadlock* dalam negosiasi. Kemudian Indonesia memberikan desakan kembali kepada MNLF untuk bersikap serius dalam bernegosiasi. Indonesia juga melakukan desakan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan aspirasi Moro. Adapun kuatnya ego kepentingan ini menyebabkan pada kebuntuan dalam negosiasi.

Tidak hanya itu, banyaknya aktor yang terlibat baik domestik ataupun internasional memperkeruh proses dalam bernegosiasi. Hal tersebut disebabkan

karena aktor-aktor yang terlibat memiliki kepentingan masing-masing baik secara politik maupun ekonomi. Tekanan politik dari internal datang dari kalangan elite Filipina seperti Mahkamah Agung, Kongres, Senat, Gereja Kristen Filipino, MILF, Lumads, dan Abu Sayyaf. Mereka melakukan protes terhadap negosiasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Fidel Ramos dan MNLF dengan berbagai asumsi dan cara masing-masing. Kemudian pengaruh politik pun muncul dari aktor internasional seperti Libia yang memenuhi kepentingan politiknya terhadap Amerika melalui Filipina dan Malaysia yang memiliki kepentingan politik perbatasan. Dari banyaknya pihak yang mencoba mengambil keuntungan dalam negosiasi tersebut berpotensi terciptanya politisasi negosiasi yang akan mempengaruhi pada kualitas hasil dari negosiasi.

Dari segala dinamika yang terjadi pada proses negosiasi, Indonesia melakukan tugasnya sebagai mediator dengan menjaga komunikasi antara pemerintah Filipina dengan MNLF untuk tetap bernegosiasi, dan juga mencari solusi alternatif sebagai jalan tengah untuk kebuntuan negosiasi dan penataan manajemen waktu untuk menjamin perjanjian.

Berhubungan dengan hal demikian, Indonesia berhasil membawa pemerintah Filipina dan MNLF dalam suatu perjanjian yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 1996 yaitu berupa *Final Peace Agreement*. Dalam FPA ini disebutkan tentang poin usulan alternatif dari Indonesia berupa otonomi khusus yang dipercaya bisa menjadi penengah dari keinginan pihak yang berkonflik karena dalam gagasan otonomi khusus ini pemerintah Filipina berpotensi mendapatkan keuntungan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi Filipina

karena meredamnya eskalasi konflik Mindanao, dan bagi pihak Moro otonomi khusus ini bisa dijadikan sebagai batu loncatan untuk negosiasi yang lebih jauh tentang negara federal dan Moro pun mendapatkan hak lebih perihal legitimasi dan jaminan baik dari segi politik, ekonomi, dan sosial dari pemerintah pusat. Dari hal tersebut kemudian gagasan otonomi khusus ini dinilai sebagai titik pusat

BATNA dalam *Final Peace Agreement 1996*